

Nomor : KP.09/442/SJ-DAG.10/SD/03/2024 Bandung, 20 Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Mekanisme Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
di Bidang Perdagangan dalam rangka Penerbitan Surat
Rekomendasi JF Perdagangan

Yth. 1. Kementerian/Lembaga Instansi Pengguna JF bidang Perdagangan; dan
2. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan Sebelum Diterbitkannya Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang akan mengangkat PNS kedalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau melalui penyesuaian, harus sudah mendapatkan persetujuan formasi dari KemenPANRB. Untuk mendapatkan persetujuan dimaksud, Instansi Pemerintah **wajib** menyampaikan usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi formasi yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan surat persetujuan formasi dari Kementerian PANRB.
2. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan selaku Instansi Pembina JF di Bidang Perdagangan menghimbau Instansi Pemerintah Pengguna JF di Bidang Perdagangan untuk dapat segera mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan pada lingkungan unit/instansi Bapak/Ibu untuk mendapat surat rekomendasi formasi.
3. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan menerbitkan rekomendasi formasi atas pengusulan kebutuhan JF Analis Perdagangan, JF Pengawas Perdagangan, JF Penera, JF Pengamat Tera, dan JF Penguji Mutu Barang bagi Instansi Daerah Pengguna JF di Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perdagangan.

4. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan menggunakan pedoman penghitungan formasi yang ada sampai dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, kecuali untuk:
 - a. Pengawas Perdagangan, menggunakan pedoman/formulir perhitungan kebutuhan dari Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dan/atau Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian; dan
 - b. Penera, menggunakan pedoman/formulir perhitungan kebutuhan dari Jabatan Fungsional Penera dan/atau Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian.
5. Mekanisme dan persyaratan pengusulan kebutuhan JF di Bidang Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
6. Contoh surat usulan kebutuhan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
 - a. Sdri. Hanifa Rahmah (HP. 082121264567) untuk wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Sdri. Nuharani Savitri (HP. 089668904370) untuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional
Perdagangan,



Sri Iryanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (sebagai laporan);
2. Kepala BKD/BKPSDM dan OPD Pengelola Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

MEKANISME PENGUSULAN KEBUTUHAN JF PERDAGANGAN

A. Pengusulan Kebutuhan JF PMB, JF Penera, JF Pengamat Tera, dan JF Pengawas Perdagangan (Ruang Lingkup kegiatan Pengawasan Metrologi Legal)

1. Instansi Pemerintah Pengguna menyampaikan surat pengajuan/usulan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan yang dikirimkan melalui email pusbinjfp@kemendag.go.id atau Hotline Pusbin JF Perdagangan +62821-1868-7772, berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja:

Dari : Sekretaris Jenderal Instansi Pusat atau Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota Instansi Daerah

Kepada : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

dengan melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut:

a. Bagi JF PMB

- 1) Form penghitungan Formasi JF PMB yang dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://www.kemendag.go.id/s/JFPMB>
- 2) Matriks Isian Kelompok Ruang Lingkup; dan
- 3) Pengelompokan Produk Laboratorium.

b. Bagi JF Penera

- 1) Form penghitungan Formasi JF Penera dan Pranata Laboratorium Kemetrologian. yang dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://www.kemendag.go.id/s/JFKemetrologian>;
- 2) Data Potensi UTTP.

c. Bagi JF Pengamat Tera

- 1) Form penghitungan Formasi JF Pengamat Tera. yang dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://www.kemendag.go.id/s/JFKemetrologian>.

d. Bagi JF Pengawas Perdagangan bidang Metrologi Legal

- 1) Form penghitungan Formasi JF Pengamat Tera. yang dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://www.kemendag.go.id/s/JFKemetrologian>.

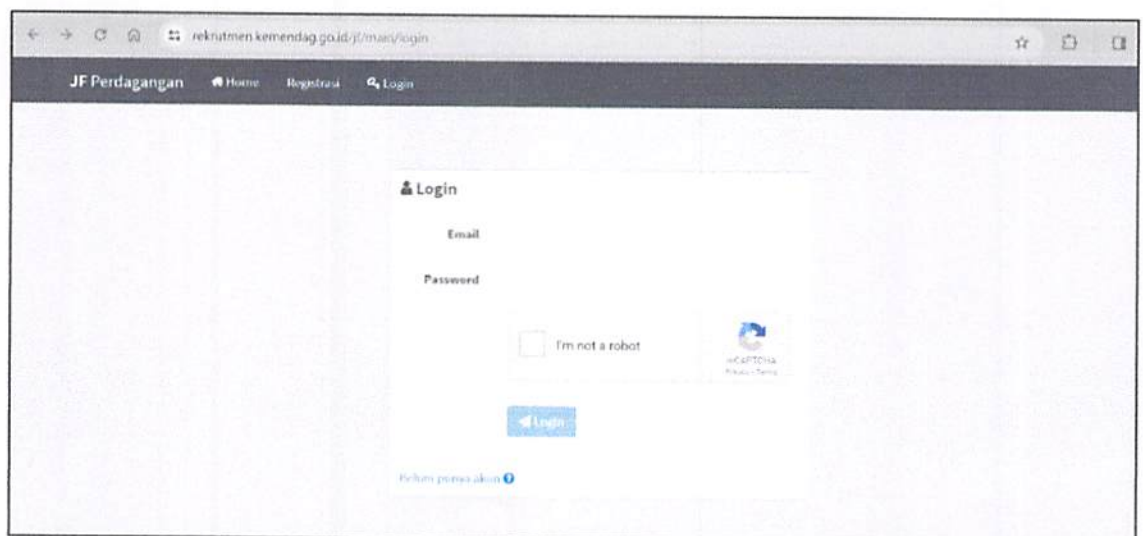
2. Mengunggah/*upload* kelengkapan berkas pada *Google Drive* yang disediakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan. Narahubung Pusbin JF Perdagangan akan menyampaikan tautan *Google Drive* dimaksud kepada PIC Instansi Pengusul. Kelengkapan berkas yang harus diunggah adalah:

- a. Surat pengajuan/usulan kebutuhan;
- b. Data Susunan Pegawai (data susunan seluruh pegawai pada unit penempatan pejabat fungsional di Bidang Perdagangan, tidak hanya jabatan yang sedang diajukan, minimal memuat keterangan seperti Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, TMT, Jabatan dan Jenjang);
- c. Data Potensi UTTP (untuk pengusulan kebutuhan JF Kemetrolagian);
- d. Format Ms. Word: Form Rencana Pengisian Bezetting/Eksisting (sesuai contoh pada Lampiran II);
- e. Scan SK pegawai eksisting JF Perdagangan;
- f. Format Ms. Excel: Form penghitungan kebutuhan JF sesuai format yang dilampirkan pada surat usulan kebutuhan;
- g. Peta/Struktur Organisasi;
- h. Bahan paparan/presentasi sebagai bahan verifikasi sesuai *template* berikut:
JF PMB: <https://kemend.ag/PPTVerifPMB> dan
JF Kemetrolagian: <https://kemend.ag/PPTVerifMETROLOGI>;
- i. Bagi pengajuan/usulan untuk penyesuaian nomenklatur, melampirkan data pegawai yang akan dilakukan penyesuaian, memuat keterangan nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan dan jenjang saat ini, TMT, jabatan dan jenjang penyesuaian nomenklatur.

3. Berkas yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, akan dibahas dalam rapat verifikasi melalui konfirmasi oleh narahubung kepada PIC Instansi Pemerintah pengusul.

B. Pengusulan Kebutuhan JF Analis Perdagangan dan JF Pengawas Perdagangan (Ruang Lingkup kegiatan Perdagangan, Barang Beredar dan Jasa)

1. Instansi daerah melakukan registrasi akun melalui *website* pengusulan kebutuhan JF Analis Perdagangan dan JF Pengawas Perdagangan berikut: <https://rekrutmen.kemendag.go.id/jf/>



2. Instansi Pemerintah Pengguna mengunggah Surat Permohonan Pembuatan Akun Admin Aplikasi Formasi

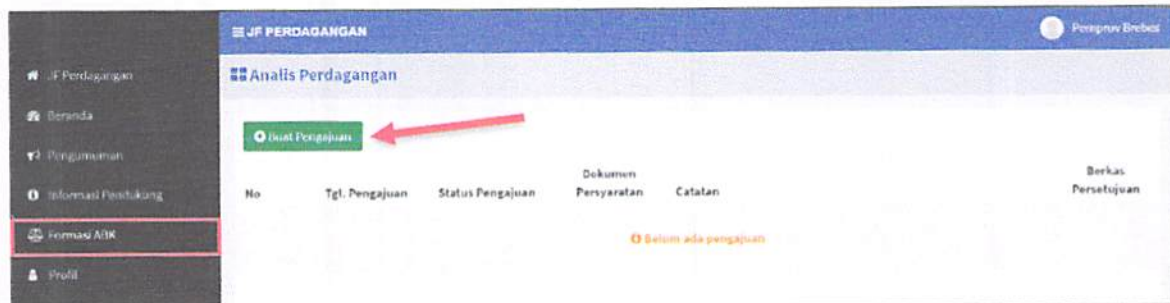
Dari : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian/Lembaga
(yang membidangi kepegawaian/jabatan fungsional) **atau Kepala Dinas** (yang membidangi Perdagangan)

Kepada : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI

Format surat dapat diunduh pada *website* atau dapat dilihat pada Lampiran II.



3. Bagi akun admin yang sudah sesuai ketentuan, narahubung akan menginformasikan bahwa permohonan telah disetujui melalui kontak PIC/admin.
4. PIC/admin Instansi Pemerintah Pengguna dapat mengusulkan kebutuhan JF perdagangan berdasarkan ABK melalui *website* dengan ketentuan:
- a) Membuat pengajuan baru.



- b) Menghitung kebutuhan JF Analis Perdagangan/JF Pengawas Perdagangan pada *website*. PIC/Admin menginput angka pada kolom "Volume Output Per-Tahun" di tiap uraian kegiatan/tugas.

Sub Urutan	Uraian Kegiatan/Tugas	Angka Kredit	Volume Output Per-Tahun	Pelaksana Tugas
1	2	3	4	5
I. Analisis Perdagangan				
1. Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	1. Menyusun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.15	10	Madya
	2. Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.11	10	Pertama
	3. Menentukan rekomendasi strategi terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.24	10	Madya
	4. Menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategi terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.14	10	Muda
	5. Melakukan uji publik rancangan hasil rekomendasi strategi terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.24	10	Madya
	6. Menganalisis dampak pengaburan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.17	10	Muda
	7. Menyusun kajian pembinaan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.21	10	Madya
	8. Menyusun kajian analisis risiko pengaburan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	7	10	Utama
	9. Melakukan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0.08	10	Muda

- c) Mengunggah surat pengajuan/usulan kebutuhan JF berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan ketentuan:

Dari : Sekretaris Jenderal Instansi Pusat atau Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota Instansi Daerah

Kepada : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Hasil Penghitungan Formasi Form Penghitungan Formasi Dokumen Persyaratan Progres Pengajuan				
Dokumen Persyaratan Pengajuan Formasi :				
Jenis Dokumen	Tipe File	Ukuran Maksimal	File Dokumen	
✖ Surat Pengajuan ASK	pdf	750 KB	✖	Unggah
✖ Struktur Organisasi (Ortaker)	pdf	5 MB	✖	Unggah

Contoh surat pengajuan/usulan kebutuhan dapat dilihat pada Lampiran II.

- d) Mengunggah Peta/Struktur Organisasi.

Hasil Penghitungan Formasi Form Penghitungan Formasi Dokumen Persyaratan Progres Pengajuan				
Dokumen Persyaratan Pengajuan Formasi :				
Jenis Dokumen	Tipe File	Ukuran Maksimal	File Dokumen	
✖ Surat Pengajuan ASK	pdf	750 KB	✖	Unggah
✖ Struktur Organisasi (Ortaker)	pdf	5 MB	✖	Unggah

5. Mengunggah/*upload* kelengkapan berkas pada *Google Drive* yang disediakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan. Narahubung Pusbin JF Perdagangan akan menyampaikan tautan *Google Drive* dimaksud kepada PIC instansi pengusul. Kelengkapan berkas yang harus diunggah adalah:
- a. Data Susunan Pegawai (data susunan semua pegawai semua pegawai pada unit penempatan pejabat fungsional di Bidang Perdagangan, tidak hanya jabatan yang sedang diajukan, minimal memuat keterangan seperti Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, TMT, Jabatan dan Jenjang);
 - b. Data Potensi Ekspor dan Komoditas (untuk pengusulan formasi JF Analis Perdagangan);
 - c. Format Ms. Word: Form Rencana Pengisian Bezetting/Eksisting (sesuai contoh pada Lampiran II);
 - d. Scan SK pegawai eksisting JF perdagangan;
 - e. Format Ms. Excel: Form penghitungan kebutuhan JF Analis Perdagangan/JF Pengawas Perdagangan (form Ms. Excel hasil perhitungan dapat diunduh di website);
 - f. Peta/Struktur Organisasi;
 - g. Bahan paparan/presentasi sebagai bahan verifikasi sesuai *template* berikut:
JF Analis Perdagangan: <https://kemend.ag/PPTVerifAndag> dan
JF Pengawas Perdagangan: <https://kemend.ag/PPTVerifPP>;
 - h. Bagi pengajuan/usulan untuk penyesuaian nomenklatur, melampirkan data pegawai yang akan dilakukan penyesuaian, memuat keterangan nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan dan jenjang saat ini, TMT, jabatan dan jenjang penyesuaian nomenklatur.
6. Berkas yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, akan dibahas dalam rapat verifikasi melalui konfirmasi oleh narahubung kepada PIC Instansi Pemerintah Pengusul.

Lampiran II

Nomor : KP.09/442/SJ-DAG/SD/03/2024

Tanggal: 20 Maret 2024

CONTOH SURAT USULAN KEBUTUHAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

1. Surat Permohonan Pembuatan Akun Admin Aplikasi Formasi

	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jalan Raya Besakih, Akah-Klungkung No Telp. (0366) 21079 SEMARAPURA															
Nomor : 500.2.4.6/1618/DKUKMPP Lampiran : - Hal : Permohonan Pembuatan Akun Admin Aplikasi Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan	Klungkung, 8 Agustus 2023 Kepada, Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan di - Tempat															
Dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen data Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, berikut usulan SDM kami yang direkomendasikan sebagai Admin Aplikasi Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan : <table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>NIP</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Instansi/Unit Kerja</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Email</td><td>:</td><td></td></tr></table>		Nama	:		NIP	:		Jabatan	:		Instansi/Unit Kerja	:		Email	:	
Nama	:															
NIP	:															
Jabatan	:															
Instansi/Unit Kerja	:															
Email	:															
Demikian usulan kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung <u>I Wayan Ardiana, SE</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651231 199203 1 169																

2. Surat Pengajuan/Usulan Kebutuhan JF Perdagangan:



KABUPATEN WONOSOBO

Wonosobo, 2 Januari 2024

Nomor : 000.8.2/008/Org
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) Bendel
 Hal : Permohonan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Kemetrologian (JF Penera, JF Pengamat Tera, JF Pengawas Kemetrologian)

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
 C.q. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
 Di Tempat

Memperhatikan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK (ASN) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- Berkenaan dengan hal tersebut kami mengusulkan kebutuhan jabatan Fungsional Kemetrologian (JF Penera, JF Pengamat Tera, JF Pengawas Kemetrologian) secara offline. Sebagai dasar kelengkapan usulan kebutuhan Fungsional Kemetrologian kami lampirkan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dapat di unduh pada link https://s.id/Data_Dukung_Usulan_JFDisdagkopUKM dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	ABK	Bezzeting	+/-
1.	Penera Terampil	10	4	-6
2.	Penera Mahir	5	0	-5

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
 Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
 Pos-el pemkab@wonosobkab.go.id, Laman website wonosobkab.go.id

No.	Jabatan Fungsional	ABK	Bezzeting	+/-
3.	Penera Penyala	1	0	-1
4.	Penera Ahli Pertama	2	2	0
5.	Penera Ahli Muda	1	0	-1
6.	Penera Ahli Madya	1	0	-1
7.	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	3	0	-3
8.	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	2	0	-2
9.	Pengawas Kemetrologian Ahli Madya	2	0	-2
10.	Pengamat Tera Pemula	2	1	-1
11.	Pengamat Tera Terampil	2	0	-2
12.	Pengamat Tera Mahir	2	0	-2
13.	Pengamat Tera Penyala	2	0	-2
JUMLAH		35	7	-28

4. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya dapat mempertimbangkan usulan kebutuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kemetrologian (JF Penera, JF Pengamat Tera, JF Pengawas Kemetrologian) di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk koordinasi lebih lanjut mengenai usulan rekomendasi kebutuhan JF dimaksud, dapat menghubungi Su. ... melalui nomor telepon/whatsapp ... Sdr. Fitri Sulistana melalui 085327068927.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Wonosobo
 Sekretaris Daerah,

 Otono Wardoyo

Tembusan:
 1. Bupati Wonosobo,
 2. Wakil Bupati Wonosobo,
 3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM,
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
 Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
 Pos-el pemkab@wonosobkab.go.id, Laman website wonosobkab.go.id

PERHITUNGAN FORMASI KABUPATEN WONOSOBO PENERA KEAHLIAN									
NO	BUTIR	Norma Waktu		Waktu Total/Tahun			Kebutuhan		
		Standar Waktu	Satuan	Volume	Total	Satuan	Pertama	Muda	Madya
A. Tera Ulang UTIP untuk Penera Keahlian									
1.	Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTIP Besaran Massa								
a.	Tingkat Kesulitan III								
1)	Timbangan kelas II	90	menit	35	3.225	menit	0.07		
2)	Timbangan kelas III > 5000 kg (Timbangan Jembatan)	345	menit	8	2.760	menit	0.04		
3)	Serata Enam	115	menit	35	4.225	menit	0.06		
4)	Serata Empat	135	menit	110	14.850	menit	0.29		
5)	Timbangan lonj berpadan	435	menit	-	-	menit	0.00		
6)	Timbangan penanak dan pemotong	255	menit	-	-	menit	0.00		
7)	Timbangan trol/WIM	435	menit	-	-	menit	0.00		
8)	MCA	45	menit	9	405	menit	0.01		
9)	Timbangan Kelewa	435	menit	-	-	menit	0.00		
2.	Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTIP Besaran Panjang								
a.	Tingkat Kesulitan III								
1)	Depth Tape (l. > 20 m)	90	menit	-	-	menit	0.00		
2)	Automatic Level (servis)	165	menit	-	-	menit	0.00		
3)	Flare Level Gauge	165	menit	-	-	menit	0.00		
4)	Capestan Level Gauge	165	menit	-	-	menit	0.00		
5)	Roller Tank Gauge	165	menit	-	-	menit	0.00		
6)	Ultrasonic Tank Gauge	165	menit	-	-	menit	0.00		
7)	Orifice Plate	60	menit	-	-	menit	0.00		
8)	Ullage Temperature Interface	120	menit	-	-	menit	0.00		
3.	Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTIP Besaran Listrik dan Waktu								
a.	Waktu Elektrik/pro. bayar								
1)	Energy Meter 1 phase kelas 0.5 - 1	125	menit	1.000	125.250	menit	1.68		
2)	Energy Meter 3 phase kelas 0.05 - 0.05	125	menit	-	-	menit	0.00		
3)	Energy Meter 3 phase kelas 0.1 - 0.2	125	menit	-	-	menit	0.00		
4)	Energy Meter 3 phase kelas 0.5 - 3	125	menit	22	3.363	menit	0.05		

B. Pengisian Tempat Pelaksanaan Tera Ulang (Lokasi UTTP & Lab Uji)						
1.	Mengkonfirmasi kebenaran ukuran, sifat, dan lokasi dari rekaman audio instalasi up dalam rangka tera/tera ulang UTTP (Lokasi UTTP)	30	menit	335	10,050	0,13
2.	Mengikuti seluruh dokumentasi prosedur yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (Lokasi UTTP)	30	menit	335	10,050	0,13
3.	Mengikuti kegiatan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (Lokasi UTTP)	45	menit	335	15,075	0,20
4.	Mengikuti kegiatan pengalihan prosedur atau pengalihan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP (Lab Mekanik, Lab Volume, dll)	120	menit	335	40,200	0,54
5.	Mengunjungi tempat kerja instalasi up dalam rangka tera/tera ulang UTTP (Lab Mekanik, Lab Volume, dll)	120	menit	335	40,200	0,54
HASIL PERHITUNGAN					2,36	1,02

Faktor Pengali (PP No.18 Tahun 2016, Hal. 127)				
1. Jawa Baki	1			
2. Sumatera	1,1			
3. Kalimantan	1,3			
4. Sulawesi	1,1			
5. Papua	1,4			
6. Kepulauan	1,5			
7. Daerah Perbatasan	1,6			
8. Pulau Terluar	1,5			

Rekomendasi Formasi SDM Penerima Keahlian					
No	Jenjang	SDM	Pembelatan	SDM saat ini	Keterangan
1	Pertama	2,36	2	2	0
2	Muda	1,02	1	0	0
3	Madya	0,54	1	0	0

* SDM : Hasil Perhitungan x Faktor Pengali

Surabaya, Desember 2023

KAPLA ANAS PURDAGAN, KEPRESIDEN UKM
KABUPATEN GORONTALO

Des. HAYO SAKUNTOMO, M. Si
Pengawas Utama Mada
NIP. 19740422 199303 1 002

Wagongan, Desember 2023

KAPALAKS PERDAGANGAN KOPERASI UAM KAMPUSAN WAGONGAN

DR. HUSNO SANTUNO, M.Bi

Pemilihan Utama Muda

SDP: 19740422 199303 1002

3. Data Susunan Pegawai

Data Eksisting Pegawai/Data SDM

No.	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/ Golongan	TMT	Jabatan	Pendidikan
1.	Tri Mahar Lazuardi	196910051989081002	IV/b	19-06-2023	Kepala Dinas	S-2 Ilmu Ekonomi
2.	Ihsan Maulana	197608282000032001	IV/a	04-01-2021	Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen	S-2 Ilmu Ekonomi
3.	Sabbikhis	197906032005012005	III/d	30-12-2022	Analisis Perdagangan Ahli Muda	S-1 Manajemen
4.	Ana Dwi	197207311992031001	III/d	09-03-2019	Pengolah Data	S-1 Akuntansi
dst						

4. Form Rencana Pengisian Bezetting/Eksisting

Form Rencana Pengisian Pejabat Fungsional Perdagangan

Jabatan Fungsional	Jumlah		Rencana Pengisian JF		
	Usulan	Bezetting	CPNS	P3K	Uji Kompetensi
Penerima Ahli Muda	2	1	0	0	1
Penerima Ahli Pertama	3	1	1	0	1
Analisis Perdagangan Ahli Muda	4	1	0	0	2
dst					

5. Surat Rekomendasi Kebutuhan JF di bidang Perdagangan



KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan M. H. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23538440-021-3858171 Ext. 32040 Fax. 021-3441759
www.kemendag.go.id

Nomor : KP.09/1234/SJ-DAG/SD/02/2024 Jakarta, 20 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan
Fungsional bidang Perdagangan di
Lingkungan Dinas Perdagangan
Kabupaten Maluku Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
di
Tempat

Menindaklanjuti pengusulan Analisis Beban Kerja dan Formasi Jabatan Fungsional bidang Perdagangan sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 123.4.5.67/8910/Disdag tanggal 1 Februari 2024 hal Usulan Permintaan Rekomendasi Kebutuhan/Formasi ABK JF Perdagangan, dengan menimbang ruang lingkup dan tipologi organisasi bidang perdagangan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, bersama ini kami sampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi dan validasi usulan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan, Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, Jabatan Fungsional Penera, dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera sebagaimana terlampir.

Selanjutnya surat rekomendasi ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan permintaan persetujuan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan, Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, Jabatan Fungsional Penera, dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan,

Sri Iryanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten Maluku Tengah.

Lampiran Surat

Nomor : KP.09/1234/SJ-DAG/SD/02/2024

Tanggal : 20 Februari 2024

**REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

NO	JENJANG	REKOMENDASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1.	Analisis Perdagangan Ahli Utama	0	• Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri • Bidang Pertindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2.	Analisis Perdagangan Ahli Madya	1	
3.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	2	
4.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	2	
TOTAL		5	

Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

NO	JENJANG	REKOMENDASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1.	Pengawas Perdagangan Ahli Utama	0	UPTD Metrologi Legal Kabupaten Maluku Tengah
2.	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1	
3.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	
4.	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2	
TOTAL		4	

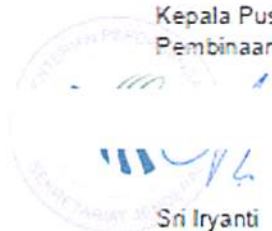
Jabatan Fungsional Penera

NO	JENJANG	REKOMENDASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1.	Penera Ahli Utama	0	UPTD Metrologi Legal Kabupaten Maluku Tengah
2.	Penera Ahli Madya	0	
3.	Penera Ahli Muda	1	
4.	Penera Ahli Pertama	1	
5.	Penera Penyelia	1	
6.	Penera Mahir	1	
7.	Penera Terampil	2	
TOTAL		6	

Jabatan Fungsional Pengamat Tera

NO	JENJANG	REKOMENDASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1.	Pengamat Tera Penyelia	1	UPTD Metrologi Legal Kabupaten Maluku Tengah
2.	Pengamat Tera Mahir	1	
3.	Pengamat Tera Terampil	1	
4.	Pengamat Tera Pemula	0	
TOTAL			3

a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan,



Sri Iryanti